

Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah

Oleh

(Muhammad Ali Hanafi, Irawan Suntoro, Yunisca Nurmalisa)

This research aims to find out the rationality of beginner voters in the regional election of Lampung Governor. This research applied descriptive quantitative method. The data collection techniques were done through structured interviews, observations, and documentation as well as validity and reliability tests using questionnaires. Based on the results of the research, it can be concluded that the rationality of beginner voters focused on the three main aspects; religion, work plans and education. These three aspects were considered to be more important than other aspects, like vision and mission, track record, ethnicity, and social class. These three aspects have been used as the main basis for beginner voters in deciding their choice, while the other aspects were used as supporting basis to vote for governor.

Keywords: *beginner voters, governor elections, rationality*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data; wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi serta uji validitas dan reliabilitas menggunakan angket. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasionalitas pemilih pemula cenderung kepada tiga aspek utama yaitu agama, program kerja dan pendidikan. Ketiga aspek itu dianggap lebih penting dibanding aspek lainnya yaitu, visi dan misi, *track record*, suku, dan golongan. Ketiga aspek tersebut dijadikan dasar utama bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihan, sedangkan aspek lainnya dijadikan sebagai dasar sampingan oleh pemilih pemula dalam memilih gubernur.

Kata Kunci : pemilihan gubernur, pemilih pemula, rasionalitas

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah salah satu wujud budaya demokrasi, dan merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan sarana sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen yang digunakan rakyat untuk mewujudkan partisipasinya dalam sistem demokrasi. Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk menjadi pemilih, dapat ikut serta dalam menyampaikan hak suaranya secara langsung melalui pemungutan suara. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sosialisasi politik kepada seseorang diawali pada masa anak-anak biasanya diperoleh dari interaksinya dengan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengenalan awal mengenai politik kepada seseorang. Agen sosialisasi politik biasanya berada dalam ruang lingkup yang dekat dengan kehidupan seseorang dan berkenaan langsung dalam proses pemahaman mengenai politik. Agen sosialisasi yang terdekat adalah keluarga dimana seorang anak memiliki intensitas lebih banyak dengan keluarga. Sosialisasi politik ini berguna untuk membekali anak terkait perannya sebagai pemilih pemula.

Karakter pemilih pemula biasanya masih labil, cenderung mengikuti pilihan teman dan baru pertama kali terlibat dalam pemilihan umum sehingga pengetahuan politiknya masih minim. Ini diperkuat dengan pernyataan Dedy Hermawan selaku Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung mengenai pemilih pemula dalam berita yang dimuat dalam situs (www.lampost.co.id) bahwa “banyak pemilih pemula yang belum paham mekanisme pemilu. Bahkan hari H pencoblosan juga belum tahu. Ketidaktahuan pemilih pemula, khususnya pelajar SMA di Lampung, disebabkan sosialisasi penyelenggara pemilu belum efektif baik sosialisasi di media massa maupun sosialisasi ke sekolah, mengingat pemilih pemula belum pernah merasakan menyampaikan hak politiknya”.

Pemilih pemula juga minim pengetahuan tentang kandidat atau

calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di daerahnya. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tuanya atau teman sejawad. Maka pemilih pemula ini menjadi sasaran yang sangat penting untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian pemilih pemula.

Hasil survey pada pemilu 2009 menunjukkan 67,55% pemilih pemula belum mengetahui secara pasti tahapan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak mengetahui jumlah partai politik peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 90,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye (KPU Provinsi Lampung).

Perbedaan data yang signifikan terjadi antara pemilu tahun 2009 dan 2014. Di tahun 2014 partisipasi pemilih pemula di mulai meningkat. Hal ini ditandai dengan hasil survey yang menyebutkan bahwa para pemilih pemula lebih menyukai partai yang melakukan pendekatan yang berbeda dari partai lain. dalam survey tersebut ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak. Partai Golongan Karya 19,80%, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18,90%, Partai Gerindra 14,40%, dan Partai Hati Nurani Rakyat 10,20%. Kenaikan data yang signifikan sangat terlihat di Provinsi Lampung. Dari 34. 614 pemilih pemula dengan presentase 2,96% yang tersebar di 2.940 TPS. Peningkatan partisipasi itu tentunya dipengaruhi pematangan sikap yang menuju ke arah positif (KPU Provinsi Lampung).

Pemikiran berlandaskan Rasionalitas mulai tertanam dalam pemilih pemula di Indonesia terutama pada pemilih pemula. Melalui sikap Rasionalitas inilah sebuah pilihan akan tepat dan tajam karena dilandasi dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang logis. Namun tentunya semua alasan yang dijadikan landasan haruslah masuk akal dan baik karena akan menentukan juga tepat tidaknya sebuah pilihan yang diambil.

Sikap Rasionalitas adalah sikap yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. Artinya memilih atau menentukan pilihan harus berdasar dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Rasionalitas sejatinya memang sangat diperlukan oleh setiap pemilih pemula, terutama di Provinsi Lampung karena dengan mempunyai sikap Rasionalitas, maka pemilih pemula mempunyai alasan dalam memilih hal tertentu dan optimal dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Selain itu sosialisasi kepada para pemilih pemula di Lampung masih kurang efektif, yang mengakibatkan pemilih pemula sangat mengandalkan sikap Rasionalitasnya. Faktor sikap Rasionalitas ini sangat berpengaruh terhadap pilihan, dan kondisi lainnya. Apalagi pemilih pemula sekarang sudah bertambah kritis dan cerdas dalam menentukan sikap. Rasionalitas bisa ditinjau dari beberapa sub yakni visi dan misi atau program kerja, *track record*, latar belakang calon gubernur atau kepala daerah.

Keberagaman yang terjadi sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Karena

sejatinya kita sebagai pelaku politik secara tidak sadar telah menerapkan politik identitas dalam memilih. Politik identitas yang dimaksud adalah mencari kesamaan antara kita dengan calon gubernur ataupun wakil gubernur seperti kesamaan visi dan misi, *track record*, kepribadian agama, dan suku.

Sikap perbedaan Rasionalitas dalam memilih sepertinya masih melekat pada diri masyarakat Indonesia terutama pada pemilih pemula. Karena kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali suku, pendidikan, bahasa juga ada beberapa agama. Biasanya hal-hal itu yang dijadikan dasar dalam memilih pemimpin, itulah yang disebut politik identitas.

Menurut wawancara peneliti dengan guru PPKn dan Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah pada hari Rabu, 21 Februari 2018 pukul 10. 21 WIB di SMA Negeri 1 Kotagajah umur siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Kotagajah yang berjumlah 329 siswa. Siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Kotagajah sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih pemula yakni 17 tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan empat orang siswa dari SMA Negeri 1 Kotagajah. Mereka mengatakan sangat antusias dengan pemilihan gubernur tahun ini, karena merupakan kali pertama mereka menyumbangkan hak suara mereka. Namun mereka menyebutkan ada beberapa hambatan dalam memilih yaitu banyaknya politik transaksional, ketidakjelasan latar belakang calon gubernur, sosialisasi politik yang kurang, masih minimnya pendidikan politik, dan bingungnya mereka dalam menentukan dasar

atau sikap rasionalitas dalam memilih.

Berdasarkan beberapa masalah atau hambatan tersebut yang paling menarik dan menjadi permasalahan utama adalah masalah sikap Rasionalitas mereka. Mereka sangat antusias menyambut pemilihan gubernur ini, namun di sisi lain mereka masih sangat kebingungan dengan landasan apa yang mereka gunakan untuk memilih antara visi, misi, dan program kerja, *track record*, latar belakang calon gubernur. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Rasionalitas

Rasionalitas memiliki makna yang relatif sama baik dari sudut pandang masyarakat umum, maupun dari sudut-sudut pandang keilmuan psikologi, ekonomika, dan filsafat. Untuk memahami benang merah antar berbagai sudut pandang itu, gambaran tentang tindakan yang dipandang rasional akan membantu. Ketika kita berharap agar seseorang bertindak secara rasional, maka yang dimaksudkan adalah orang lain tersebut bertindak berdasarkan keputusan yang dipikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat dan objektif.

Baron dalam Rahmat Hidayat (2016: 103) “dirumuskan bahwa rasionalitas merupakan sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika kita mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan

yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Sebagai sebuah ukuran normatif, keputusan seseorang dan keyakinan yang mendasarinya dapat dinilai sebagai benar dalam arti rasional, atau tidak”.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut Indria dalam Rahman (2007: 147) disebut juga “political market”. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih.

Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan umum hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, melainkan juga suatu sarana untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh elit politik di DPRD seperti era orde baru, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Menurut Zuhro, dkk (2009: 48) “pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif”.

4. Pengertian Pemilih

Pemilih Pemilu adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Menurut Joko J. Prihatmoko (2005:46): “pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan”.

5. Pemilih Pemula

Undang-undang pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga survey internasional seperti *Pew Research Center* dan *Gallup*, pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Setiap akan melaksanakan pesta rakyat dalam memilih wakil rakyat atau yang kita sebut dengan pemilihan umum, sudah pasti akan adanya pemilih pemula disetiap pelaksanaan pemilu. Menurut M. Rusli Karim dalam Tubagus Ali (2012: 102) menyatakan bahwa ”pemilih pemula adalah warga

negara Indonesia yang belum memiliki pengalaman sama sekali menusuk tanda gambar organisasi politik”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018, khususnya mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan :

- a. Visi, misi, dan program kerja sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- b. Program kerja sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- c. *Track record* sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- d. Agama sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- e. Suku sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- f. Pendidikan sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- g. Golongan sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Menurut Siregar (2013: 86), “pada penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji

statistic”. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi kedalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, sikap, motivasi dan lain sebagainya.

Populasi Menurut Sofar Silaen (2013:87) “populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti, seperti penduduk, universitas, sekolah, buruh, karyawan, dll”. Menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan menurut Sangadji (2010: 185) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi pada penelitian ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang belum pernah menyalurkan hak suara sebelumnya.

Sampel Menurut Sofar Silaen (2013:87) “sampel adalah bagian populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria yang

telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10% jumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kotagajah yang berjumlah 329 siswa yang diambil secara acak. Dilihat dari data SMA Negeri 1 Kotagajah dengan demikian jumlah keseluruhan adalah 32,9 dibulatkan menjadi 33 siswa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket (kuesioner), Wawancara dengan informan, dan Dokumentasi hasil penelitian.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data hasil penelitian tentang maka peneliti akan menjelaskan keadaan dan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh sebagai berikut mengenai “Rasionalitas Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”:

1. Berdasarkan Indikator Visi dan Misi

Visi dan misi adalah salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh pemilih pemula, karena visi dan misi memuat cita-cita dan tujuan calon gubernur

dan wakil gubernur. Menurut Wibisono (2006:43) visi merupakan “rangkaiian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi merupakan rangkaiian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa”.

Indikator visi dan misi adalah indikator utama bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya karena berisi cita-cita dan tujuan dari calon gubernur dan wakil gubernur. Idealnya pemilih pemula harus mengetahui visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur agar bisa menelaah dan menentukan pilihan dengan baik.

Hasil analisis data berdasarkan indikator pandangan dapat diketahui bahwa sebanyak 51,5% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju menjadikan visi dan misi menjadi dasar dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka beranggapan bahwa kurangnya sosialisasi tentang visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur kepada pemilih pemula, menjadi hal yang membuat mereka tidak terlalu mementingkan visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur.

Pemilih pemula memang seharusnya memahami visi dan misi dari calon gubernur dan wakil gubernur karena itu adalah tonggak lahirnya program kerja. Kebanyakan pemilih pemula berpendapat bahwa visi dan misi yang ditawarkan terlalu bertele-tele

dan terlalu diplomatis. Semua pihak seperti orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus ikut bekerjasama untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula agar mereka mengetahui pentingnya memahami visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur.

Visi dan misi hendaknya memang jangan terlalu bertele-tele dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh setiap kalangan. Selain itu visi dan misi hendaknya lebih dijelaskan kepada semua kalangan karena itu merupakan hal yang penting untuk dipahami. Kurang setujuinya pemilih pemula ini sebabnya adalah karena kurangnya pemahaman akan pentingnya visi dan misi.

2. Berdasarkan indikator Program Kerja

Program kerja merupakan rumusan dari indikator visi dan misi dan merupakan hal yang penting dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut Jones (1994:34) program kerja adalah “cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai”.

Hasil analisis data berdasarkan indikator program kerja dapat diketahui bahwa sebanyak 51,5% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah dilihat dari indikator program kerja masuk dalam kategori setuju jika

program kerja dijadikan dasar dalam memilih. Hal ini dikarenakan program kerja adalah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan calon gubernur dan wakil gubernur jika terpilih. Siswa beranggapan bahwa program kerja yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi pemilih pemula, selain itu program kerja calon gubernur dan wakil gubernur mudah ditemukan di media sosial maupun media masa, bahkan pada debat kandidat pun sesuatu yang ditonjolkan oleh calon gubernur dan wakil gubernur adalah program kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sosialisasi mengenai program kerja harus selalu ditingkatkan baik di media sosial, media masa maupun media yang lain agar para pemilih pemula bisa lebih tahu dan memahami karakter dari calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini bisa juga memicu tingkat kekritisannya pemilih pemula dan memacu untuk lebih andil dalam urusan politik kenegaraan.

Hal ini tentunya sesuatu yang bagus karena mengingat program kerja adalah apa saja yang nanti dilakukan oleh calon gubernur saat terpilih nanti. Program kerja juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lebih disosialisasikan dibandingkan dengan visi dan misi. Cara untuk mempertahankan agar pemilih pemula tetap kritis dalam hal program kerja adalah dengan terus memberikan banyak sosialisasi yang menyeluruh kepada para pemilih pemula bahkan ke semua kalangan, bahkan hal itu bisa ditingkatkan jika peran aktif dari penyelenggara pemilu ditambah dengan calon

gubernur untuk mensosialisasikan program kerja.

3. Berdasarkan indikator *Track Record*

Track record merupakan bagian penting juga bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihan. *Track record* adalah semua hal yang dilakukan seseorang pada di masa lalu dan dapat di jadikan teladan sampai sekarang. *Track record* merupakan hal yang sangat vital dalam diri calon gubernur dan wakil gubernur karena calon gubernur dan wakil gubernur harus mempunyai *track record* yang baik, minimal tidak pernah terlibat menjadi kriminal.

Hasil analisis data berdasarkan indikator *track record* dapat diketahui bahwa sebanyak 58% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah dilihat dari indikator *track record* masuk dalam kategori kurang setuju. Hal ini dikarenakan *track record* menurut mereka tidak terlalu mempengaruhi kemampuan seseorang. Kebanyakan dari siswa beranggapan bahwa yang terpenting adalah kemauan dan kapasitasnya sekarang, bukan dilihat di masa lalunya. Siswa beranggapan juga bahwa banyak dari pejabat Indonesia yang mempunyai *track record* kurang bagus tapi masih bisa menjadi pejabat daerah bahkan menjadi gubernur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, siswa menganggap bahwa *track record* merupakan hal yang tidak terlalu berpengaruh pada pemilih pemula. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan kejujuran yang dilakukan pada masa sekarang. Sebenarnya hal ini

didorong juga oleh krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Mereka beranggapan bahwa *track record* tak berpengaruh jika calon gubernur dan wakil gubernur mempunyai uang untuk menyuap KPU.

Hal ini tentunya tidak dapat disalahkan walaupun *track record* adalah sesuatu yang perlu diperhatikan juga. Terbatasnya informasi dan pola pikir bahwa masa lalu seseorang tidak penting membuat para siswa kurang setuju jika *track record* dijadikan dasar utama dalam memilih. Untuk mengatasi hal ini adalah dengan lebih menunjukkan jatidiri kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun media sosial agar masyarakat terutama pemilih pemula dapat lebih mengetahui dan rekam jejak atau *track record* calon pemimpinnya.

4. Berdasarkan Indikator Agama

Agama erat kaitannya dengan pemahaman. Menurut Anas Sudjiono (1996:50) pemahaman adalah “jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan”. Menurut Jalaludin (2012:317) agama adalah “gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri”.

Berdasarkan hasil analisis rasionalitas pemilihan gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori setuju hal ini dikarenakan agama merupakan ranah privat yang dimiliki setiap seseorang terlebih karena Indonesia adalah Negara yang berketuhanan yang maha esa. Mereka menganggap bahwa dalam agama mereka diperintahkan untuk memilih pemimpin yang mempunyai agama yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebanyak 45,45% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah beranggapan bahwa agama merupakan hal yang sangat utama dalam mempertimbangkan memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka menganggap bahwa agama ini hal yang paling utama dari semua indikator karena menunjukkan karakter moral yang berhubungan dengan Tuhan.

Kita tidak bisa mengusik ranah privat seseorang. Seharusnya para partai politik dalam mengkampanyekan calon dan wakil gubernur paham bahwa seseorang tidak bisa menuruti hal yang bertentangan dengan nilai agama, contohnya dalam islam dilarang memilih orang non-islam sebagai pemimpin. Jadi ketika pemilih pemula mempertimbangkan pilihan dalam hal kepercayaan agama, kita tidak boleh mengusiknya.

Hal ini tentu sangat patut dipertahankan karena memang ranah privat seseorang yang berhubungan dengan agama tidak bias diusik. Rata-rata siswa memilih pemimpin yang seagama dengannya karena di dalam agama pun diperintahkan. Cara untuk mempertahankan pencapaian ini adalah dengan selalu membekali

anak dengan nilai agama agar mereka tahu perintah dari agamanya termasuk dalam hal memilih pemimpin.

5. Berdasarkan Indikator Suku Bangsa

Menurut Anthony Smith (1997:81) suku bangsa adalah “suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama, dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu adalah keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama. kedua hal ini biasanya menjadi ukuran bagi solidaritas dari suatu komunitas”.

Berdasarkan hasil analisis rasionalitas pemilihan gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39,40% siswa masuk kategori kurang setuju hal ini dikarenakan mayoritas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah sudah paham bahwa suku bangsa memang ranah privat tetapi tidak ada peraturan khusus yang mengikat untuk memilih calon pemimpin dengan suku yang sama. Dalam kegiatan politik di Indonesia mereka juga paham bahwa sangat jarang para tokoh politik mengedepankan suku bangsa dalam berkampanye. Mereka juga beranggapan bahwa mayoritas calon gubernur dan wakil gubernur bahkan presiden berasal dari suku yang berbeda-beda menunjukkan bahwa suku tidak menjadi masalah dalam hal memilih pemimpin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, siswa SMA Negeri 1 Kotagajah suku bangsa bukan

merupakan pertimbangan utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur karena suku merupakan urusan kepada sesama manusia, berbeda dengan indikator agama yang berhubungan dengan sang Pencipta. Jadi menurut mereka memilih berdasarkan suku memang sah-sah saja namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal ini juga tidak bisa disalahkan karena mereka tidak mau timbul konflik antar suku. Pola pikir maju seperti ini yang harus selalu dipertahankan dalam diri siswa. Dalam skornya memang ada beberapa siswa yang menunjukkan setuju terhadap suku apabila dijadikan salah satu landasan dasar memilih pemimpin. Maka dari itu siswa harus selalu diberi penjelasan dan diberi wawasan tentang kemajemukan Indonesia agar mempunyai sikap toleransi dan tak memandang suku dalam bergaul termasuk dalam hal memilih pemimpin.

6. Berdasarkan Indikator Pendidikan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 16) mendefinisikan secara umum “pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan”.

Berdasarkan hasil analisis rasionalitas pemilihan gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 48,48% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah

dalam kategori setuju hal ini dikarenakan mayoritas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah sudah paham bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam setiap individu karena kita bisa melihat kecerdasan calon gubernur dan wakil gubernur dengan melihat pendidikannya. Berdasarkan pengertian dari Sekidjo Notoatmodjo di atas juga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar melakukan yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan dapat menentukan kecerdasan strategi dalam memimpin sebuah kelompok atau masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, siswa SMA Negeri 1 Kotagajah pendidikan merupakan pertimbangan yang sangat penting juga dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur selain indikator agama dan program kerja. Mereka menganggap bahwa pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dalam memimpin dan bersikap. Orang yang berpendidikan akan selalu mengambil keputusan berdasarkan segala pertimbangan yang matang, maka dari itu siswa SMA Negeri 1 Kotagajah beranggapan bahwa hal seperti itu sangat dibutuhkan oleh pemimpin.

Hal ini tentu sesuatu yang baik karena pendidikan merupakan hal yang sangat krusial di Indonesia. Tingkat pendidikan menjadi hal yang sangat penting di Indonesia, hal itu ditunjukkan dengan pencantuman gelar di belakang nama adalah sesuatu yang seolah wajib di Indonesia. Cara untuk mempertahankan ini adalah dengan

memberi sosialisasi yang lebih kepada para pemilih pemula tentang tingkat pendidikan calon gubernur yang dipilih. Selain itu calon gubernur harus mempunyai tutur kata dan kelakuan yang baik, karena dari cara berbicara dan berperilaku, akan mencerminkan berpendidikan atau tidaknya calon gubernur tersebut.

7. Berdasarkan Indikator Golongan

Menurut Eko Sujatmiko (2014:85) menerangkan bahwa golongan adalah “perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarkis)”. Hasil analisis data berdasarkan indikator golongan dapat diketahui bahwa sebanyak 51,51% siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju menjadikan golongan sebagai indikator utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut dikarenakan siswa sudah memahami esensi dari perbedaan antar lapisan masyarakat di Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada siswa SMA Negeri 1 Kotagajah dapat diketahui bahwa mereka beranggapan bahwa perbedaan golongan pada masyarakat Lampung atau biasa disebut stratifikasi social tidak akan berpengaruh besar terhadap pilihan dari pemilih pemula. Mereka tidak terlalu mementingkan golongan dari calon gubernur dan wakil gubernur, baik miskin tau kaya, tua atau muda, berasal dari pedesaan atau perkotaan, bagi mereka itu tidak terlalu berpengaruh besar. Bagi siswa SMA Negeri 1 Kotagajah yang terpenting adalah memiliki karakter moral,

berjiwa pemimpin, dan jujur dalam segala hal.

Hal ini merupakan sesuatu yang unik dan bernilai positif, karena pemilih pemula menganggap bahwa dari golongan apapun dia berhak menjadi gubernur. Hal ini musti dipertahankan dengan cara selalu meembekali siswa tentang ilmu dunia. Karena bukan hanya yang kaya, yang miskinpun mempunyai hak yang sama untuk menjadi gubernur, dan yang tinggal di desa pun punya hak yang sama untuk bisa menjadi gubernur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah:

1. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika visi dan misi dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
2. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika program kerja dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
3. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika *track record* dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
4. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika agama dijadikan dasar utama dalam

- memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
5. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika suku dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
 6. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika pendidikan dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
 7. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika pendidikan dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baron, J. (2008). *Thinking and deciding*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayat, Rahmat. 2016. Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir. *Jurnal Buletin Psikologi UGM*. Vol. 24 No. 2.
- Jalaludin, Rakhmat. 2009. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pilkada Secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Ir. Syofian, M.M. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silaen, Sofar. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Smith, Anthony D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. London: Basil Blackwell.
- Sudjiono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.